

Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau

Fitri Sholawati Ritonga

Abstract

Economic success is measured by indicators of economic growth. To boost economic growth must be supported by infrastructure development. Indonesia is still experiencing a disparity in development between regions. There are still many areas outside Java that are experiencing infrastructure problems. Riau Province which has the potential of resources continues to increase infrastructure development in order to promote economic growth and equalization of development. Infrastructure development in Riau has boosted economic growth, this is seen from Riau economic growth that is growing positively and quite significantly. llage, Rural Poverty.

Keywords: Infrastructure, Economic Growth, Riau Province

Abstrak

Keberhasilan ekonomi diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus didukung dengan pembangunan infrastruktur. Indonesia masih mengalami disparitas pembangunan antar wilayah. Masih banyak daerah di luar Pulau Jawa yang mengalami masalah infrastruktur. Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya terus meningkatkan pembangunan infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. pembangunan infrastruktur di Riau telah mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Riau yang tumbuh positif dan cukup signifikan.

Kata Kunci: Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Riau

Pendahuluan

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 menyatakan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah masalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan maka negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari

peningkatan kemampuan dan ketersediaan faktor produksi dan teknologi. Faktor produksi terdiri dari buruh, tanah, modal dan teknologi.

Peningkatan buruh dilihat dari dua sisi, yaitu secara kuantitas yaitu semakin banyak tenaga kerja, secara kualitas adalah semakin baik kompetensi buruh yang meliputi hard competence dan soft competence. Tanah mencakup semua sumber daya yang ada dan terkandung di dalam dan di atasnya. Semakin luas tanah, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga tanah merupakan faktor yang akan meningkatkan GDP potensial. Modal berkaitan dengan semua hal yang digunakan untuk berproduksi, termasuk sarana umum yang digunakan untuk memperlancar sarana produksi yaitu infrastruktur seperti jalan, pembangkit listrik, sarana air bersih dan lainnya. Semakin tinggi modal, maka produktifitas juga akan semakin tinggi. Teknologi dibutuhkan untuk menolong peningkatan produktivitas. Semakin canggih teknologi, semakin produktif faktor produksi. Untuk meningkatkan teknologi dibutuhkan penelitian ilmiah. Atas dasar penelitian ilmiah, teknologi terus berkembang sehingga produktivitas meningkat.

Setiap negara akan berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sudah menjadi persoalan yang turun temurun di setiap pemerintahan dan belum menunjukkan tanda tanda penurunan angka kemiskinan. Setiap pemerintahan telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang terfokus pada pusat atau sentralistis membuat daerah tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Banyak daerah yang masih tertinggal dan belum tergarap potensi sumber daya yang ada karena ketiadaan infrastruktur, seperti jalan yang rusak, ketiadaan listrik, jembatan penghubung antar wilayah yang rusak, belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pola pembangunan kemudian bergeser menjadi desentralisasi. Hakikat otonomi daerah adalah pemberian kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi dikatakan terpasung. (Mardiasmo, 2002).

Dengan adanya keleluasaan untuk berkreasi maka daerah mempunyai kesempatan lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini karena daerah sendirilah yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu provinsi yang melaksanakan otonomi daerah adalah Provinsi Riau. Riau memiliki berbagai potensi sumber daya, namun potensi ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin di Riau pada tahun 2019 sebesar 480,72 ribu orang. Angka ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau, maka jumlah penduduk miskin mencapai 7,08 persen. (data Badan Pusat Statistik Riau).

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Riau termasuk provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah regional Sumatera. Provinsi Riau memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah regional Sumatera dengan kontribusi sebesar 22,08 %. Perekonomian Riau triwulan I-2020 tumbuh sebesar 2,24 %, melambat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,89 %. Perekonomian Riau triwulan I-2020 yang diukur berdasarkan produk domestic regional bruto (PDRB) atas harga konstan mencapai Rp 190,96 triliun dan atas dasar harga konstan 2020 mencapai 123,09 triliun. Ekonomi Riau triwulan I-2020 tumbuh sebesar 2,24 persen (y-on-y).

Hasil pembangunan bisa dilihat dari sisi nilainya seperti PDB atau PDB perkapita, bisa juga dilihat dari sisi pertumbuhan seperti pertumbuhan PDB, dan bisa juga dilihat dari sisi pemerataan. Pemerataan merupakan aspek penting yang terlupakan, karena selama ini pemerintah hanya menekankan aspek pertumbuhan ekonominya. Padahal setiap penduduk menginginkan untuk menikmati hasil pembangunan semaksimal mungkin.

Untuk mendukung terciptanya pemerataan ekonomi, pemerintah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, sehingga usaha-usaha produktif masyarakat bisa berkembang karena didukung infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur merupakan unsur utama dalam pembangunan. ketersediaan infrastruktur akan membuka akses masyarakat terhadap sumber daya, sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Melalui metode kepustakaan, artikel ini akan menyoroti pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Berdasarkan pada laporan World Development Report (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat infrastruktur yang memadai. Di Indonesia penelitian yang membahas pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian dengan hasil yang bervariasi. Sibarani menyatakan bahwa infrastruktur listrik dan pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan (Sibarani, 2002).

Kebijakan infrastruktur yang terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat menimbulkan kesenjangan atau disparitas pendapatan per kapita masing masing daerah terutama daerah kawasan Indonesia bagian timur. Penelitian Yanuar dengan data panel 26 provinsi menunjukkan

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah adalah proses kenaikan ouput per kapita (Boediono, 1985). Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto atau Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) (Saragih 2003, Kuncoro 2004). Namun penggunaan PDB atau PDRB sebagai indicator pertumbuhan ekonomi kurang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, oleh karena itu sebagai alternatif digunakan pendapatan per kapita sebagai indicator. Indicator ini menekankan pada peningkatan PDB/PDRB yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Kuncoro membagi daerah menjadi empat jenis dilihat dari kemampuan daerah mengembangkan pertumbuhan ekonominya.

1. Daerah cepat maju dan pertumbuhan tinggi (High Growth dan High Income)
Daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dari rata rata kabupaten dan kota
2. Daerah maju dan tertekan (High Income but Low Growth)
Daerah yang memiliki peningkatan ekonomi yang tinggi namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata rata kabupaten kota.
3. Daerah Berkembang Cepat (High Growth but Low Income)

Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat namun belum diiringi oleh peningkatan pendapatan per kapitanya masih rendah disbanding rata rata kabupaten kota

4. Daerah relative tertinggal (Low Growth, Low Income)

Daerah yang pertumbuhan ekonominya lambat dan pendapatan per kapitanya lebih rendah dari rata rata kabupaten kota.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

- b. pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. perubahan inventori, dan
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Infrastruktur

Kodoatie menyatakan bahwa Infrastruktur merupakan fasilitas yang disiapkan oleh agen agen public untuk fungsi fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan pelayanan lain untuk tujuan ekonomi dan sosial.

World Bank ,1994 membagi infrastruktur menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur yang dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, gas, sanitasi), public work, (jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, bandara, pelabuhan, terminal dan lainnya).
2. Infrastruktur social, yaitu infrastruktur yang dimanfaatkan untuk tujuan social seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi yaitu infrastruktur yang dimanfaatkan untuk tujuan pelayanan administrasi masyarakat meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Provinsi Riau

Riau jika dikaji secara bahasa, asal mula kata riau adalah dari bahasa portugis, yaitu “rio” yang artinya sungai. Provinsi Riau merupakan penggabungan dari beberapa kerajaan Melayu yang pernah Berjaya yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1728-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau Lingga (1824-1913), dan beberapa kerajaan kecil lainnya.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun (17 November 1952 s / d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Provinsi Riau dengan pelaksanaan otonomi daerah memiliki kemudahan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Berdasar pada visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Riau selama periode 2005-2025 yaitu “ mewujudkan provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara tahun 2020 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan provinsi Riau.

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan, dan 1.847 Kelurahan / Desa. Jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2018, sebanyak 6.074.647 jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI) .Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km² dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%).

Infrastruktur Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau dan beberapa instansi terkait terus berusaha untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ini dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses komunikasi, transportasi, listrik, air, serta sarana perumahan dan lain-lain.

Salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat ialah tersedianya sarana umum yang memadai. Pembangunan sarana umum ini meliputi jalan penghubung dalam Kota, antar kota, antar kabupaten, jembatan, listrik dan infrastruktur kepentingan publik lainnya.

Penyediaan infrastruktur melalui program pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju sentra produksi, serta mengatasi keterisolasian wilayah, dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi masyarakat ialah tersedianya sarana umum yang memadai. Pembangunan sarana umum ini meliputi jalan penghubung dalam Kota, antar kota, antar kabupaten, jembatan, listrik dan infrastruktur kepentingan publik lainnya.

Penyediaan infrastruktur melalui program pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju sentra produksi, serta mengatasi keterisolasian wilayah, dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Berikut adalah jenis-jenis pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau hingga tahun 2017.

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Panjang total jalan Provinsi Riau pada tahun 2017 adalah 25.796,9 Km dengan rincian panjang jalan negara 1.336,62 km, panjang jalan provinsi 2.799,81 km dan panjang jalan kabupaten/kota 21.661,47 km. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, hingga tahun 2017, sebanyak 501 Unit yang mana terdiri dari 379 unit jembatan beton, 6 jembatan komposit, dan 86 unit jembatan rangka. jika ditotalkan panjang jembatan di Provinsi Riau pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 yaitu dari 8.493,75 meter meningkat menjadi 11.163,05 meter.

Beberapa proyek infrastruktur prioritas yang diusulkan pemerintah Riau yaitu tol Pekanbaru - Padang, tol Pekanbaru - Jambi, serta jalur kereta Riau. Kemudian percepatan operasional layanan penyeberangan rute internasional di roro Dumai – Melaka serta pengembangan bandara Dumai yakni perpanjangan runway di Bandara Pinang Kampai. Selain itu, ada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata di Pulau Rumpi sebagai pulau terluar, dan penanganan abrasi pantai di wilayah kepulauan dan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Di Riau tengah berlanjut proyek strategis nasional yaitu jalan tol Pekanbaru - Dumai yang terdiri dari lima sesi.

Pertumbuhan Ekonomi Riau

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tentang Perekonomian Riau, ekonomi Riau tumbuh positif dan cukup signifikan. Pada triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 2,91% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2019 yang sebesar 2,75% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang meningkat dari 4,49% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 4,61% (yoy) pada triwulan IV 2019 namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka akan terlihat kebalikannya karena ekonomi nasional tercatat melambat dari 5,02% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 4,97% (yoy) pada triwulan IV 2019.

Dari sisi penggunaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2019 berasal dari tumbuhnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah yang cukup signifikan. Meningkatnya kedua faktor tersebut diantaranya disebabkan oleh peningkatan investasi PMA dan PMDN di Provinsi Riau terutama di sektor industri perkebunan, industri kimia, dan sektor konstruksi serta percepatan realisasi anggaran pemerintah menjelang akhir tahun 2019. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi yang meningkat bersumber dari LU Pertambangan dan Penggalian, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman. Kontraksi lifting migas yang tidak sedalam triwulan sebelumnya, percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, dan beroperasinya sejumlah *franchise* perdagangan retail (seperti *fashion* dan aksesoris) serta *franchise* gerai makanan & minuman di Pekanbaru menjadi beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2019.

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Riau selain karena jumlah konsumsi pemerintah, disebabkan juga karena bertambahnya investasi berupa penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di bidang perkebunan, dan industri.

Percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis juga menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur strategis mendukung peningkatan industri seperti pertambangan dan penggalian, dan usaha lain. maka hal ini bersesuaian dengan harapan bahwa infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bapenas pada Indonesia Development Forum 2018, Riau termasuk dalam 5 Provinsi diluar Pulau Jawa yang menikmati keuntungan terbesar dari pembangunan infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut :

Provinsi	Kontribusi Terhadap Pertumbuhan
Gorontalo	9,1 %
Kalimantan Tengah	7,3 %
Riau	5,1%
Sumatera Selatan	4,7%
Bengkulu	4,2%

Berdasarkan tabel ini Riau menikmati keuntungan sebesar 5,1 % dari pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur mendorong produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Riau.

Kesimpulan

Infrastruktur terlihat berdampak positif bagi perekonomian. Dengan adanya pembangunan infrastruktur turut mendorong sektor lain dalam perekonomian seperti industri dan usaha perkebunan, pertanian, pertambangan dan lainnya.

Riau termasuk provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah regional Sumatera. Pada triwulan IV 2019, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 2,91%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ditunjang oleh peningkatan konsumsi pemerintah, investasi yang terus berkembang, dan industri yang terus meningkat karena didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Saran

Pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan pemerataan ekonomi diantaranya dengan pembangunan infrastruktur di daerah. Dengan pembangunan infrastruktur di daerah maka potensi sumber daya yang ada bisa dikembangkan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adi, Priyo Hari, 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*, Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW (Terakreditasi).
- Dewi, Novita.2017. Pengaruh Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, Jurnal JOM Fekon, Vol, 4 no 1 Februari.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Kementrian PPN/ Bappenas.2018. *Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan*, disampaikan dalam Indonesia Development Forum.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Prasetyo, Rindang Bangun dan Firdaus, Muhammad, *Pengaruh Infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Yanuar, R. 2006. *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana IPB, Bogor.
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/riau/Pages/LPP-Riau-Februari-2020.aspx>
- <https://riau.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto.html#subjekViewTab3>
- <https://riau.go.id>